



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNARTI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TERMINAL
3. NHK : 456313

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah Seluas 443 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 802 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 32.000.000

1. MOTOR, HONDA MF 125 SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA APX12021C08 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, SUZUKI PU 154 SGD Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA F1F02N1 2M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 650.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 948.650.000

III. HUTANG Rp. 325.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 623.650.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.